

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik merupakan suatu hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi konflik yang terjadi di dalam lingkup pemerintah dan masyarakat. Walaupun dikatakan hal yang wajar terjadi, akan tetapi konflik merupakan hal yang harus dianalisa dan diselesaikan agar tidak terjadinya hal-hal yang akan berdampak di dalam kehidupan bersosial. Berbicara mengenai konflik yang terjadi di dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi pasca kebakaran, dapat dilihat jika secara umum memang ada konflik yang terjadi terkait dengan segala hal yang terjadi dalam proses pembangunan. Di mulai dari awal pembangunan, di pertengahan pembangunan, bahkan sampai pasar diresmikan terdapat beberapa hal yang di antara pemerintah sebagai pihak yang membangun dan pedagang. Namun konflik di sini terlihat sedikit berbeda dengan konflik-konflik yang biasa terjadi di dalam pembangunan pasar. Bahwasanya konflik tidak datang dari pedagang secara keseluruhan.

Berdasarkan teori tahapan konflik Simon Fisher yang digunakan peneliti dapat disimpulkan bahwa konflik memang bisa dijelaskan dengan alur ceritanya, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan konflik tidak selalu memiliki alur yang lurus, konflik tidak selalu memiliki satu alur, serta konflik tidak selalu stabil. Konflik bisa saja memiliki lebih dari satu alur dan bisa saja memiliki dinamika di dalam

prosesnya. Dengan menggunakan teori tahapan ini peneliti lebih cenderung menjelaskan konflik secara umum, dalam artian seperti konflik Pedagang Pasar Atas dengan Pemerintah Kota didalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi pasca kebakaran tahun 2017. Dalam realita adanya perpecahan antara pedagang, adanya perbedaan alur konflik antara pemerintah kota dengan masing-masing pedagang. Dari hal tersebut cukup sulit untuk menjelaskan konflik secara detail, karena kembali lagi teori tahap konflik lebih cenderung menggiring peneliti untuk menceritakan konflik secara umum.

Konflik awalnya bermula saat seluruh pedagang tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengenai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Saat itu pedagang di bawah nama P4B membentuk Tim Negosiasi P4B. Tim Negosiasi P4B awalnya dibentuk dengan tujuan membahas dan mengatur segala hal terkait dengan kebakaran. Jadi P4B dan Tim Negosiasi P4B menyuarakan mengenai ketidaksetujuan mereka mengenai lokasi akan di bangunnya TPS. Setelah permasalahan mengenai tempat TPS dengan pemerintah selesai P4B membubarkan Tim negosiasi dengan alasan bahwa orang-orang di balik Tim Negosiasi justru menuntut hal-hal yang sudah di luar kepentingan bersama, seperti mengadukan TPS ke Komnas HAM, ke OMBUDSMAN, ke DPRD, pengaduan kelompok koordinasi mengatakan bahwa TPS tidak layak, tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Sejak saat itu P4B membubarkan Tim Koordinasi P4B dan menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pedagang pasar atas akan diwakilkan oleh P4B. Namun kelompok yang dibubarkan mendirikan kelompok baru dengan nama Perhimpunan Pemilik Toko

Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi. Konflik kembali naik kepermukaan dengan adanya tuntutan kelompok Perhimpunan karena pemerintah tidak mengikutsertakan mereka di dalam pembangunan dan pada saat perobohan bekas bangunan mereka tidak diajak, sedangkan saat perobohan bangunan P4b yang menjadi perwakilan pedagang berada dilokasi dan ikut dalam perencanaan. Konflik berada di puncak ketika munculnya surat pemberitahuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengenai sistem penggunaan dan sewa toko pasar atas yang baru. Pedagang saat itu, bukan hanya perhimpunan tapi juga P4B sempat keberatan dengan sebuah point di dalam surat yang menyatakan bahwa toko akan menggunakan sistem sewa murni dan tidak boleh dipindahtangankan. Permasalahan itu dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan P4B dan sebagian besar pedagang menerima dan tetap mendukung pembangunan, akan tetapi tidak dengan perhimpunan yang melakukan tuntutan bahkan sampai kepihak pusat. Perhimpunan mempermasalahkan mengenai sistem sewa murni, tidak bisa dipindahtangankan, tidak bisa memiliki lebih dari satu toko. Perhimpunan merasa pemerintah sangat arrogant dan merebut hak mereka karena pasar atas dibangun di atas tanah adat dan dibangun oleh orang tua mereka. Jadi perhimpunan merasa pemerintah tidak berhak menentukan hal tersebut dan pemerintah dituduh merebut hak mereka atas kepemilikan toko. Tapi pemerintah tidak menanggapi terlalu serius karena semua yang dilakukan tidak ada melanggar hukum dan semua sejalan dengan hukum dan undang-undang yang ada. Tuntutan yang dilakukan perhimpunan tidak satupun diterima, hal ini terkait dengan pemerintah yang tidak melanggar hukum sedikitpun. Bahkan perhimpunan sempat mengancam tidak akan mendaftar looting, namun

anggota perhimpunan melanggar perjanjian itu dan tetap mendaftar. Dalam hal ini pemerintah tetap fokus merampungkan pembangunan, beberapa tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan pedagang tetap dibicarakan dan dikomunikasikan. Sampai saat ini perhimpunan pemilik toko merasa pemerintah tidak ingin bertemu mereka. Pemerintah mengatakan jika segala hal yang memiliki keterkaitan dengan pasar atas akan dikoordinasikan dengan P4B, sedangkan perhimpunan tidak ingin bergabung dengan P4B dan tetap dengan kelompok mereka sendiri. Sampai saat ini Pasar Atas Bukittinggi telah rampung dan pedagang sudah melakukan looting dan akan segera menempati toko yang baru.

Jadi konflik ini bukanlah konflik pedagang secara keseluruhan dengan pemerintah kota, tetapi hanya sebagian pedagang saja. Berdasarkan data yang ada mengenai P4B memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah sehingga mereka mendukung pembangunan itu memang ada benarnya, akan tetapi setiap keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan pedagang, P4B tetap mendatangi pemerintah untuk meluruskan hal-hal tersebut. Di sini bukan berarti P4B selalu setuju dengan pemerintah, dan P4B memang menyatakan bahwa pemerintah periode saat ini memang keras dan kurang melakukan musyawarah dengan masyarakat terutama pedagang. Jadi P4B dan pedagang mendukung pembangunan hanya semata-mata mereka agar bisa segera berdagang apalagi di saat pandemi Covid-19 yang melanda di awal 2020 memang sangat mempengaruhi perekonomian mereka. Pedagang hanya ingin segera berjualan agar memiliki pemasukan kembali.

Terkait dengan perhimpunan yang masih melakukan tuntutan dan mengatakan pemerintah tidak ingin duduk dan berkomunikasi dengan mereka, karena pemerintah merasa beberapa orang di balik perhimpunan ini memiliki kepentingan di dalam pembangunan yang berujung untuk keuntungan mereka sendiri. Jika mereka ingin berkomunikasi dengan pemerintah maka semua berada di bawah P4B. di luar P4B dianggap bukan membahas pembangunan tetapi kepentingan individu atau kelompok.

Konflik yang terjadi antara pedagang Pasar Atas dengan Pemerintah Kota Bukittinggi ini bukan hanya konflik yang dinamis dan memiliki satu alur saja. Konflik ini muncul dari dua belah pihak pedagang yang memiliki tuntutan berbeda. Konflik ini juga memiliki intensitas yang naik turun mulai dari awal mula terjadinya konflik sampai akhir dari perjalanan konflik, sehingga konflik ini memiliki dinamika yang berbeda-beda. Perjalanan konflik bisa dijelaskan dengan teori tahapan yang dipakai peneliti. Namun dilihat dari perjalanan konflik. Tahapan konflik tidak dapat membahas konflik secara detail. Hal ini dikarenakan tahapan konflik bisa menjelaskan konflik secara detail apabila konflik yang terjadi memiliki satu alur, terjadi antara satu pihak dengan satu pihak lainnya, dan perjalanan konflik yang dinamis. Sedangkan konflik yang terjadi antara pedagang pasar atas dengan pemerintah kota memiliki intensitas yang naik turun, konflik yang terjadi antara dua belah pihak pedagang dengan pemerintah kota sehingga indikasi konflik lebih kompleks. Konflik pada penelitian ini tidak memiliki alur yang bertahap, dalam artian konflik memiliki permasalahan yang berbeda yang menyebabkan intensitarnya naik turun.

6.2 Saran

Terlepas dari kepentingan atau sebagainya, pemerintah kota sebaiknya memberikan waktu untuk perhimpunan dan seharusnya mencoba untuk bermusyawarah. Komunikasi dua arah menjadi kunci di dalam penyelesaian konflik ini. Terlepas pihak perhimpunan memiliki keinginan tersendiri di dalam pembangunan, namun keinginan pihak perhimpunan untuk bisa bermusyawarah dengan pemerintah kota haruslah diberlakukan. Pemerintah kota seharusnya sedikit melunak dan mendengarkan apa saja yang menjadi point permasalahan dari pihak perhimpunan. Karena jika tidak konflik ini akan selalu ada dan tidak akan berakhir. Sebaiknya pemerintah kota sedikit melunak baik dalam segala hal, terutama dalam membuat dan mengimplementasikan sebuah keputusan serta melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 yang mengatakan pemerintah haruslah memprioritaskan pedagang yang sebelumnya telah terdaftar. Terlepas adanya kepentingan pribadi, mereka merupakan pedagang yang juga memiliki hak di dalam pasar.

Mengenai pembangunan, pemerintah kota sudah menjelaskan jika pembangunan dilakukan oleh pihak pusat langsung. Di sini sebaiknya pemerintah kota meminta bantuan pusat untuk menjelaskan dan memberi pernyataan terhadap pembangunan ini agar semua jelas. Pihak pusat dikabarkan tidak memberikan suara apapun mengenai konflik, entah karena mereka sudah mengetahui permasalahan atau mereka mengetahui kepentingan di balik konflik di dalam pembangunan pasar.

Selanjutnya dari segi akademis, bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti dan menulis skripsi dengan pembahasan konflik pedagang dan pemerintah kota sebaiknya juga melihat serta menjabarkan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Sebaiknya jangan hanya terpaku terhadap konflik atau dalam artian permasalahannya saja. Sebaiknya juga memiliki referensi lainnya mengenai konflik dalam pembangunan pasar, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih luas untuk menjelaskan mengenai fenomena konflik yang terjadi. Seperti di dalam konflik ini, adanya pembangunan dari pusat jadi kita bisa mencari data ke pihak pusat. Selanjutnya ada perbedaan pendapat dan pandangan dari satu pihak, sebaiknya perlumengetahui secara detail mengenai pihak-pihak berkonflik. Mengetahui secara detail mengenai kapan perkumpulan mereka berdiri, apa tujuan mereka terhadap konflik, sebaiknya harus mengetahui latar belakang dan orientasi politik mereka. Semua hal itu bertujuan agar bisa menganalisis konflik lebih mendalam, dapat melihat segala sisi dan mengambil keputusan dan jalan keluar terhadap konflik yang diteliti, sehingga dapat memberikan petunjuk serta solusi bagi pemerintah ataupun pihak-pihak lain mengenai konflik dan cara penyelesaiannya.